

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perkembangan informasi dan teknologi berkembang pesat dengan adanya beberapa penemuan teknologi dari seseorang atau sekelompok orang yang ingin menciptakan sesuatu yang dapat digunakan / bermanfaat bagi setiap orang.

Dalam hal ini peranan pemerintah sangatlah penting dalam mengimplementasikan undang-undang hak cipta, merek, paten, desain industri terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia agar setiap hasil karya yang dibuat tidak diklaim atau di bajak oleh pihak lain. perlindungan hukum tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan semangat bagi para pembuat ide-ide kreatifitas terutama di bidang teknologi.

Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah penguatan sistem HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang efektif dan kompetitif secara internasional.

Tidak semua orang tahu tentang manfaat perlindungan hukum terhadap hasil invensi dari seseorang sehingga banyak orang menganggap Invenisi mereka yang dipakai orang lain tanpa izin dari pencipta/inventor tersebut

merasa bangga karena penemuannya tersebut telah digunakan oleh orang lain walaupun tidak ada timbal balik yang dirasakan oleh inventor tersebut. maka diperlukan peranan pemerintah dalam mensosialisasikan tentang perlindungan hukum tersebut.

Di dunia akademis kesadaran terhadap HKI masih rendah. Indikasinya adalah banyaknya hasil penelitian yang belum memiliki hak paten sehingga mudah sekali dibajak orang lain. Penyebabnya antara lain masih rendahnya insentif atau penghargaan atas karya penelitian oleh pemerintah sehingga peneliti tidak terdorong untuk menghasilkan karya ilmiah yang inovatif. Di samping itu, kurangnya anggaran pemerintah untuk bidang riset dan teknologi menghasilkan lingkungan yang tidak kondusif untuk menghasilkan SDM dengan kualitas keilmuan yang memadai. Terakhir, aneka pengeluaran dan biaya perjalanan untuk pengurusan paten masih menjadi halangan tersendiri bagi orang yang akan menghasilkan hak paten.¹

Di Indonesia, Undang-undang yang melindungi karya cipta adalah Undang-undang nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta, dan telah melalui beberapa perubahan dan telah diundangkan Undang-Undang yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak diundangkan. Tidak hanya karya cipta, invensi di bidang teknologi (hak paten) dan kreasi tetapi penggabungan antara unsur bentuk, warna, garis (desain produk industri) serta tanda yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan jasa (merek) juga perlu diakui dan dilindungi

¹ Haris munandar, Sally Sitanggang, 2011, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: ERLANGGA, Hal. 6-7

dibawah perlindungan hukum. Dengan kata lain Hak atas kekayaan Intelektual (HKI) perlu didokumentasikan agar kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat dihindari atau dicegah.

Adapun pengertian HKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana HAKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merek. Namun jika dilihat lebih rinci HAKI merupakan bagian dari dua benda yaitu benda tidak berwujud (benda imateriil). Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 bagian, yaitu:

1. Hak Cipta (*copyright*) adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup:
 - a. Paten (*patent*) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
 - b. Desain industri (*industrial design*) adalah suatu kreasi tentang bentuk,konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk

menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

- c. Merek (*trademark*) adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
- d. Penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition*);
- e. Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
- f. Rahasia dagang (*trade secret*) adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Pengertian Invensi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (2) adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk, proses, Sedangkan Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama.

Ada empat alasan mengapa sistem paten diciptakan, pertama untuk mengadakan penciptaan itu sendiri, kedua untuk menyebarluaskan penemuan yang sudah diperoleh, ketiga untuk menginvestasikan sumber daya yang diperlukan guna melakukan eksperimen, produksi, dan pemasaran atas penemuan yang ada, keempat untuk mengembangkan dan menyempurnakan penemuan-penemuan terdahulu.²

Di Indonesia banyak sekali contoh hasil Inovasi yang dibuat oleh para Inventor dalam mengembangkan hasil teknologi yang sebelumnya belum pernah ada ataupun hasil pengembangan Inovasi yang pernah ada kemudian dikembangkan lagi menjadi alat yang lebih praktis lagi sehingga mudah digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia. Sebagai contoh seorang Inventor dari kota Boyolali telah menemukan alat penghemat bahan bakar untuk motor. Produk yang dihasilkan dari penemuan seorang Inventor tersebut diberi nama Magic Ring. alat tersebut sudah didaftarkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (DirjenHKI) dan sudah mendapat sertifikat hak paten dan sertifikat merek. Untuk memproduksi hasil inovasinya tersebut, Inventor dan investor melakukan kerjasama yaitu dengan mendirikan suatu usaha bersama dengan memproduksi barang bernama Magic Ring dalam jumlah yang banyak untuk kemudian dipasarkan di masyarakat, dengan maksud bagi hasil antara Inventor dengan investor. dengan sistem pembagian dalam persen yaitu pihak pertama dalam hal ini yaitu Inventor mendapat 60% dan pihak kedua yaitu Investor mendapat 40% dengan syarat Investor memegang

² Tim Lindsey, 2002, *hak kekayaan intelektual*, Jakarta: PT.ALUMNI, hal. 96

sertifikat paten yang telah disepakati di awal kerjasama tersebut sebagai jaminan.

Dalam akta perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut dijelaskan bahwa pihak pertama memperoleh modal awal produksi dan pihak kedua membawa sertifikat paten yang atas nama pemilik paten yaitu pihak pertama dengan perjanjian apabila kerjasama berakhir ataupun terjadi suatu masalah antara kedua belah pihak tersebut di selesaikan melalui Pengadilan Negeri Boyolali. namun dalam proses kerjasama tersebut tidak berjalan dengan lancar dikarenakan adanya suatu kendala yang dialami oleh Investor tersebut, maka Inventor selaku pengelola usaha tidak dapat menjalankan produksi tersebut. sehingga mengalami kerugian dalam arti tidak dapat meneruskan produksi yang sebelumnya telah disepakati bersama dalam akta perjanjian kerjasama. Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan mengenai bagaimana konstruksi hukum dari hubungan hukum antara Inventor dengan Investor dalam perjanjian kerjasama? Serta bagaimana perlindungan hukum terhadap Inventor dalam proses penyelesaian sengketa terhadap Investor yang melakukan wanprestasi diluar pengadilan?

Berdasarkan hal-hal yang tertulis diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian yaitu: **Kepemilikan Paten spare part studi tentang konstruksi hukum dalam perjanjian antara CV.Indosumitech dengan Investor di Boyolali** (studi kasus paten produk penghemat bahan bakar Magic Ring).

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konstruksi dari hubungan hukum antara Inventor dengan Investor dalam perjanjian kerjasama?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap Inventor dalam proses penyelesaian sengketa terhadap Investor yang melakukan Wanprestasi diluar pengadilan?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk menjelaskan konstruksi hukum dari upaya perlindungan hukum terhadap pemilik hak paten.
2. Untuk mendeskripsikan upaya perlindungan hukum terhadap Inventor dalam proses penyelesaian sengketa terhadap Investor yang melakukan Wanprestasi diluar pengadilan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa khasanah keilmuan dalam bidang hukum dan dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat yang akan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah Untuk menambah wawasan tentang perlindungan hukum terhadap Inventor dalam perjanjian kerjasama antara Inventor dan Investor, dapat memecahkan masalah dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Inventor dengan Investor serta hak dan kewajiban antara kedua belah pihak pada perjanjian kontrak kerjasama yang telah dibuat dan di saksiakan dihadapan notaris.

E. Kerangka Pemikiran

Pengertian konstruksi hukum adalah cara kerja atau proses berpikir hakim dalam menentukan hukum atau menerapkan suatu ketentuan perundang-undangan. Konstruksi hukum terdiri dari konstruksi analogi, penghalusan hukum dan *argumentum a contrario*. Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain. Atau dalam arti lain hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hokum. Subyek yang diatur dalam hubungan hokum yaitu orang atau badan hokum, sedangkan obyek dari hubungan hokum yaitu segala Sesutu yang diperoleh dengan pengorbanan. Dalam sebuah hubungan hokum antara Investor dan Inventor melekat sebuah hak dan kewajiban antara para pihak, hubungan hokum tersebut merupakan hubungan yang diatur dan diakui oleh hokum sehingga apabila terjadi pertentangan

didalam hubungan hokum terdapat akibat-akibat hokum dan prosedur penyelesaian sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan bagaimana upaya penegakan hukum terhadap perlindungan hukum bagi pemilik hak paten dan proses penyelesaian sengketa perjanjian kerjasama antara inventor dengan Investor yang melakukan Wanprestasi di luar pengadilan sehingga dapat menjelaskan secara lebih rinci bagaimana penyelesaian sengketa tanpa proses hukum di pengadilan tetapi penyelesaian dilakukan di luar pengadilan serta bagaimana hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerjasama.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.³ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepskan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga

³ Soerjono soekamto, 1986, *pengantar penelitian hukum*, Jakarta: UI Press, hal 67

lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah "terbatas" pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti dari berbagai jenis metode pendekatan yuridis normatif yang dikenal, penulis memilih bentuk pendekatan normatif yang berupa, inventarisasi peraturan perundang-undangan dan pengkajian terhadap taraf sinkronisasi baik yang vertikal maupun yang horizontal

2. Jenis Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu konstruksi dari hubungan hukum antara Inventor dengan Investor dalam perjanjian kerjasama dan upaya perlindungan hukum terhadap Inventor dalam proses penyelesaian sengketa terhadap Investor yang melakukan Wanprestasi diluar pengadilan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum primer

Yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti., yang dimaksudkan untuk dapat lebih memahami maksud dan arti dari data sekunder yang ada.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang paten, Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, buku, jurnal.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan secara langsung dan relevan dalam penelitian ini diperlukan adanya suatu teknik pengumpulan data yang tepat. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji. Adapun instrumen pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data, yang diperoleh selama kajian dilakukan.

b. Wawancara (*interview*)

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer yang digunakan dengan cara melakukan wawancara secara bebas terpimpin,

dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek yang diteliti.⁴

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari objek yang akan diteliti secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan pada CV.Indosumitech.

5. Lokasi penelitian

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian pada CV.Indosumitech.

6. Obyek penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subyek adalah CV.Indosumitech

7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengorganisasikan dan mengumpulkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesa kerja.⁵

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara normatif kualitatif yang bertolak dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, norma-norma, serta doktrin yang akan didiskusikan dengan data yang telah diperoleh dari obyek yang diteliti berupa kontruksi hukum dari upaya penegakan hukum terhadap pemilik hak paten sebagai satu kesatuan yang utuh. Kemudian ditarik kesimpulan sehingga pada tahap akhir akan ditemukan *hukum in-concreto*.

⁴ Moh. Nazir, Ph.D, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 200\3. Hal. 193-194

⁵ Lexy J.Meleong,1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosada Karya, hal.80

G. Sistematika penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan hukum ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Berisi tentang : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka pemikiran, Metode Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Berisi tentang a) Tinjauan umum Perjanjian Berisi tentang : Pengertian Perjanjian, Hubungan Hukum, Dasar-dasar dalam suatu perjanjian, Pihak-pihak dalam suatu perjanjian, Macam-macam syarat terpenuhinya perjanjian, Akibat hukum perjanjian, Wanprestasi dan akibat hukumnya, b) Tinjauan umum paten Berisi tentang : Pengertian paten, Syarat paten, Subyek dan Obyek paten, Jangka waktu perlindungan paten, Bentuk-bentuk perlindungan paten, c) Aspek hukum penyelesaian sengketa diluar Pengadilan Berisi tentang : Alternatif Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan, Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Berisi tentang : Kontruksi dari hubungan hukum antara Inventor dengan Investor dalam perjanjian kerjasama, Upaya perlindungan hukum terhadap Inventor dalam proses penyelesaian sengketa terhadap Investor yang melakukan wanprestasi di luar pengadilan

BAB IV PENUTUP Berisi tentang : Kesimpulan, Saran